

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak desa sebagai suatu wilayah pemerintahan terendah. Desa merupakan suatu Kumpulan sosial yang mempunyai hak untuk berdiri sendiri dan menentukan kebijakannya sendiri, desa juga merupakan suatu instansi sosial yang berperan penting pada masyarakatnya. Desa terlahir dari berbagai jenis tradisi, adat istiadat dan budaya yang menjadi suatu regulasi dan pedoman bagi masyarakatnya. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang telah ditentukan batas-batas wilayahnya serta memiliki kebebasan untuk mengurus dan mengelola kepentingan masyarakatnya berdasarkan dengan nasal-usul adat istiadat yang dihormati serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hal ini dinyatakan dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Sedangkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang hak otonom dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" merupakan suatu regulasi hukum saat dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No 25 Tahun 1999 membahas mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat maupun pemerintahan daerah sebagai penyelenggaraan otonomi daerah. Dimana dari kedua Undang-undang ini mempunyai misi yaitu desentralisasi.

Konsep Desentralisasi dalam UU No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah yang menunjukkan tiga pola otonomi yang terdiri dari

otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi yang luas, dan otonomi desa sebagai otonomi yang asli dan utuh. Otonomi Desa adalah suatu kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan desa. Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan UU No 2 tahun 2015 dalam menangani urusan pemerintahan yang di dasarkan oleh wewenang, tugas dan kewajiban yang nyata dan benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi untuk memberdayakan daerah termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama. Pada Proses Desentralisasi ini memberikan kesadaran tentang Kemandirian daerah yang bergantung pada pemberdayaan sumber daya lokal merupakan inti dari konsep ini. Pada dasarnya, upaya untuk mencapai kemandirian tersebut perlu dimulai dari tingkat pemerintahan terendah, yaitu tingkat desa. Pemerintah Desa diyakini memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengidentifikasi potensi lokal dan memahami kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan pemerintah kabupaten, yang seringkali menghadapi tantangan yang lebih kompleks dan melibatkan berbagai aspek masalah. Oleh karena itu, pembangunan di tingkat desa harus diselaraskan dengan permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat, dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Pemerintah desa sudah diberikan kebebasan untuk mengelola keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam proses pembangunan desa hal ini tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Dijelaskan di dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu rancangan keuangan pemerintah yang dirancang setiap tahun, rancangan ini dikelola berdasarkan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat dan juga bagian dari rencana pengelolaan program kerja desa. Dengan adanya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa mempunyai

kebebasan yang lebih besar dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan keuangan desa dalam pelaksanaan Pembangunan desa. Hal tersebut tidak terlepas dari prinsip pengelolaan keuangan desa yaitu, transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Dengan demikian dapat meminimalisir adanya penyelewengan ataupun kecurangan pada pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa harus diselenggarakan berdasarkan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai suatu bentuk akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat. Terkait dengan adanya pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pencatatan serta pelaporan hingga pertanggungjawaban. Selain itu Permedagri Nomor 20 Tahun 2018 menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan desa.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam mewujudkan *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, akan semakin meluas seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan informasi yang cepat dan akurat. Dengan semakin majunya teknologi informasi mampu memanfaatkan fungsi dari jaringan internet yang sangat memungkinkan untuk masyarakat bisa mengakses dan memperoleh data yang tersedia secara bersamaan dengan cepat dan mudah. Pada kenyataannya kualitas pelayanan publik masih butuh perbaikan dan peningkatan dalam kualitas pelayanannya. Teknologi informasi sangat diperlukan bagi masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang memerlukan informasi yang tepat dan cepat agar mereka tidak mengalami ketertinggalan. Hal ini didukung oleh Peraturan Bupati kabupaten cianjur Nomor 48 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan ini penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif untuk memberikan informasi serta pelayanan yang cepat, tepat, dan hemat untuk masyarakat, hal ini juga merupakan suatu hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi publik yang harus dijamin kebebasan serta perlindungannya. Sistem informasi desa (SID) berbasis *website* dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dan bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat didukung dengan kemajuan teknologi yang dapat digunakan dalam Realisasi APBDes seperti pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dari kondisi yang kurang baik menuju kepada kondisi yang lebih baik lagi, dalam pembangunan sebuah desa diperlukannya informasi dan komunikasi. Dengan adanya *Website* Kampung Pinter (*Smart Village*) menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari sebuah Realisasi APBDes serta peran pemerintah Desa maupun Masyarakat desa itu sendiri. Kampung Pinter (*Smart Village*) begitu penting untuk dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya, karena secara teknis program ini diharapkan mampu membantu pemerintah untuk mendokumentasikan data-data Realisasi APBDes seperti penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat serta masyarakat juga bisa dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi secara cepat.

*Smart Village* merupakan sebuah konsep desa pintar yang indikatornya mengadopsi dari *smart city* dan mengembangkan sebuah pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di dalam konsep *smart village* ini tidak hanya berfokus kepada penerapan kecanggihan teknologi pada sebuah desa akan tetapi sebuah cara untuk memaksimalkan keadaan desa menjadi lebih baik lagi dan mengelola sumberdaya yang ada menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan (Agung Saputra & Rahman Isnain, 2021). pada penerapan konsep "*smart*" di pedesaan berdasarkan dengan pemikiran

bahwa desa merupakan sebuah pemerintahan paling kecil hal ini diperlukan adanya pembaruan terhadap perkembangan teknologi informasi yang akan mempercepat proses pembangunan sebuah desa dengan itu akan muncul kekuatan ekonomi nasional yang berbasis sumber daya manusia yang unggul dan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih dan menimbulkan sebuah lingkungan sosial yang baik juga (Subekti & Damayanti, 2019).

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hal ini menjadi pertimbangan utama bahwa desa mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat itu secara mandiri dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Salah satu dampak dari Adaya penerapan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa ini dikarenakan adanya alokasi anggaran dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) anggaran ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang ada di desa seperti Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan desa dan kegiatan desa lainnya disesuaikan dengan kondisi geografis, Tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan lainnya. Dana desa juga dialokasikan untuk peningkatan sistem informasi dan manajemen informasi di desa guna menertibkan sistem administrasi, publikasi desa, transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mampu memberikan informasi seputar desa kepada masyarakat. Website desa menjadi salah satu bagian dari sebuah sistem informasi yang ada di desa berfungsi sebagai media informasi dan transparansi dalam mempublikasikan informasi terkait keuangan dan media interaksi antara pemerintah desa kepada masyarakat luas.

Website desa telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab IX bagian ketiga pada pasal 86 yang menyebutkan bahwa:

1. Desa berhak untuk mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh aparatur daerah di kabupaten/kota
2. Pemerintah pusat maupun daerah wajib untuk mengembangkan sistem informasi desa dan Pembangunan Kawasan pedesaan.
3. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi fasilitas perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*), jaringan dan sumber daya manusia.
4. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi data desa, data Pembangunan desa, Kawasan pedesaan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan Pembangunan desa serta Pembangunan Kawasan pedesaan.
5. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikelola oleh pemerintah desa serta dapat diakses oleh masyarakat desa dan seluruh pemangku kepentingan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan Pembangunan di kabupaten/kota untuk desa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Cipendawa Kecamatan Pacet yang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur yang mempunyai website sebagai media penyebaran informasi dan transparansi kepada publik. Pada penelitian kali ini peneliti menemukan sebuah permasalahan terkait belum adanya penerapan sistem informasi mengenai APBDes ataupun data lainnya pada *website* Desa Cipendawa sebagai bentuk dari efektivitas website desa sebagai media informasi dalam pengelolaan APBDes di Desa Cipendawa yang mengarah kepada tiga indikator dalam upaya mengukur efektivitas dalam penggunaan website yang dilaksanakan oleh aparatur desa dan masyarakat di desa Cipendawa belum efektif dikarenakan pencapaian tujuan dan adaptasi pada pegawai yang kurang berperan dan kurang

memiliki kemampuan dalam mengelola website karena jika dilihat dari sumber daya manusia yang ada pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Data Perangkat Desa Tahun 2024**

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	H. Acep Ganda Permana, S.IP	Kepala Desa	S1
2.	E Junaedi	Sekretaris Desa	SMA
3.	E Suparman	Kaur TU dan Umum	Paket C
4.	Ema Fitriani	Kaur Keuangan	S1
5.	Ichsan KH Mukmin, S.Ap	Kaur Perencanaan	S1
6.	Adhe Mulyana ZF	Kasi Pemerintahan	Paket C
7.	Rahmat Hidayat	Kasi Pelayanan	STM
8.	Nandar Darmasyah, S.P	Kasi Kesejahteraan	S1
9.	Ayi Komarudin	Kadus I	SMA
10.	Sutisna	Kadus II	SMA
11.	Andi Suryadi	Kadus III	Paket C
12.	Mat Rudi	Kadus IV	SMA
13.	H. Hoerudin, S.Pd	Kadus V	S1
14.	Okky Jeriansyah Nasrun	Kadus VI	S1
15.	Encep Wahyudin	Kadus VII	SMA

Sumber: Desa Cipendawa, Diolah Peneliti, 2024

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa beberapa aparatur desa cipendawa hanya lulusan paket c dan sedikit sekali perangkat desa yang memiliki Pendidikan S1 hal ini berdampak pada penerapan sistem informasi

dalam pengelolaan APBDes yang merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah desa dalam memberikan kemudahan kepada Masyarakat desa untuk mengakses data desa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa sebagaimana tercantum dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014. Permasalahan yang ditemukan yaitu dalam salah satu indikator Efektivitas menurut Duncan (1973) dalam (Steers, 1985) yaitu pada indikator integrasi dan adaptasi hal ini disebabkan karena belum adanya sosialisasi oleh pemerintah desa cipendawa kepada masyarakat desa serta masyarakat belum mendapatkan kemudahan dalam mengakses dokumen terkait APBDes dikarenakan keterbatasan publikasi pada website desa yang belum menampilkan informasi mengenai keuangan desa maupun data lainnya oleh pihak pemerintahan Desa yang disebabkan, karena belum ada SDM yang memahami dan mampu dalam mengelola Website desa kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengerti teknologi informasi sehingga menyebabkan di nonaktifkannya website desa yang mengakibatkan belum terdapat akses yang mudah dan kejelasan dalam memperoleh informasi terkait data keuangan maupun data lainnya yang berkaitan dengan desa. Hal ini dapat dilihat pada website desa cipendawa (<https://cipendawa-pacet.kampungpinter.co.id/>).

Berdasarkan dari adanya permasalahan tersebut Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur untuk mengetahui bagaimana mekanisme ataupun proses dari efektivitas penerapan sistem informasi APBDes di Desa Cipendawa. Oleh karena itu penelitian ini membahas terkait Efektivitas penerapan website sebagai media informasi APBdes di Desa Cipendawa yang terletak di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan diatas dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Website Desa Sebagai Media Informasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur”** karena semakin berkembangnya zaman teknologi



yang semakin berkembang dan canggih sehingga perlu adanya upgrade dalam publikasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa, karena dengan begitu akan memaksimalkan program kerja sesuai dengan apa yang diharapkan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis untuk memudahkan dalam memahami penjelasan di atas diperlukan adanya identifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui website Desa Cipendawa tidak mengalami perkembangan, karena tidak ada postingan apapun pada laman website
2. Informasi pada website Desa Cipendawa kurang informatif.
3. Penerapan sistem informasi yang masih minim sehingga belum adanya publikasi baik data keuangan desa maupun data lain yang berkaitan dengan desa pada website desa cipendawa.
4. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) di desa cipendawa yang paham teknologi atau sistem informasi menyebabkan belum adanya publikasi pada website desa.
5. Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Cipendawa masih belum bisa memanfaatkan sistem yang ada dikarenakan belum adanya pelatihan khusus sistem informasi pada perangkat desa cipendawa sehingga belum paham dalam pemanfaatan sistem informasi yang ada.
6. Kurangnya sosialisasi mengenai website desa oleh pihak Desa menyebabkan masyarakat banyak belum mengetahui adanya website desa cipendawa.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dari identifikasi masalah yang ada peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pencapaian tujuan pada Website Desa sebagai Media Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana Integrasi pada Program Website Desa sebagai Media Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana Adaptasi pada Program Website Desa sebagai Media Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana Pencapaian Tujuan pada Website Desa sebagai Media Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana Integrasi Program Website Desa sebagai Media Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana Adaptasi pada Program Website Desa sebagai Media Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan dengan uraian masalah yang dikaji oleh penulis. Penulis berharap agar penelitian dapat memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi banyak pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang bisa didapatkan meliputi:

- 1) Manfaat Secara Teoretis

Penelitian ini memiliki manfaat yang sangat bermanfaat sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang teknologi informasi dan e-government, terutama dalam hal Efektivitas Website Desa sebagai media Informasi APBDes di Desa Cipendawa. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi ataupun panduan bagi penelitian selanjutnya di bidang Keuangan Publik.

## 2) Manfaat secara Praktis

- a. Bagi penulis, berharap agar penelitian ini mampu meningkatkan pengetahuan maupun pemahaman penulis serta bisa memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Bagi Instansi, hasil penelitian ini bisa berguna bagi pemerintahan Desa Cipendawa juga mampu menjadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam proses pengambilan keputusan dan mampu membantu pemerintah Desa dalam meningkatkan efektivitas website sebagai media informasi dalam pengelolaan APBDes.
- c. Bagi penulis selanjutnya, penulis berharap penelitian ini mampu menjadi acuan ataupun referensi bagi peneliti yang tertarik dalam Menyusun penelitian dengan topik atau bidang yang sama.

## F. Kerangka Pemikiran

Dalam penerapan website desa sebagai media informasi APBDes di desa cipendawa tentunya memiliki tujuan seperti halnya dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan juga sebagai suatu bentuk transparansi pemerintah desa cipendawa kepada masyarakat melalui website ini, sebagaimana telah dijelaskan pada UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada penelitian ini membahas berkaitan dengan efektivitas organisasi dimana yang akan dibahas adalah penggunaan website di Desa

Cipendawa, dimana desa cipendawa memiliki visi dan misi dalam mewujudkan desa digital dalam penelitian ini peneliti mencoba menggunakan teori efektivitas merupakan jangkauan usaha suatu program, sebagai sistem dengan sumberdaya dana sarana tertentu yang bertujuan sebagai pemenuhan tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu sendiri tanpa memberikan tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya Steers, (1985). Kualitas efektivitas program dalam hal ini ialah mendeskripsikan kemampuan aparatur desa dalam mewujudkan desa digital yang sudah dirancang sebelumnya, pengukuran efektivitas oleh Duncan dalam Steers, (1985) memiliki tiga indikator yaitu:

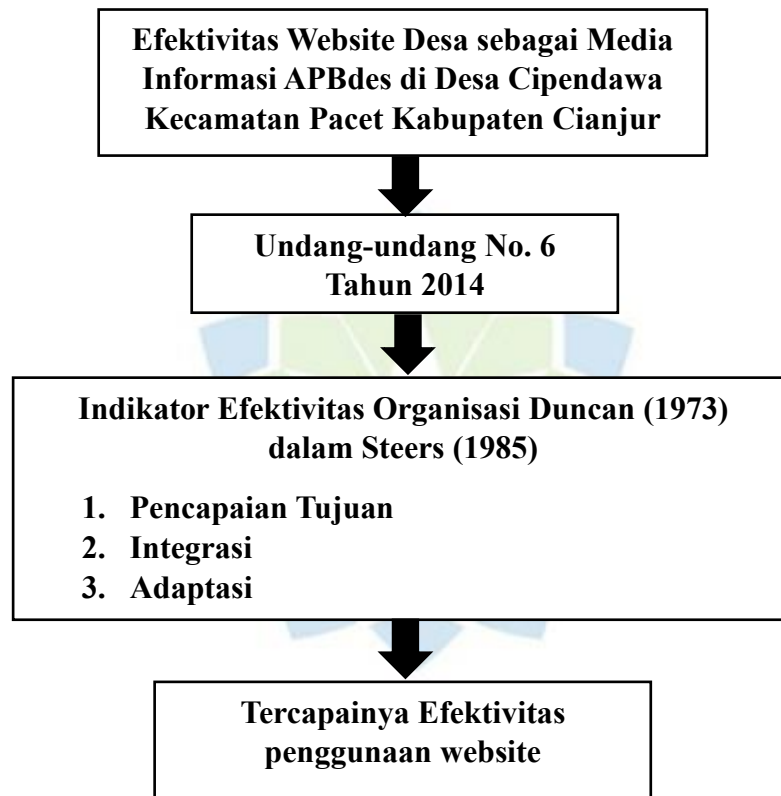
- a. Pencapaian tujuan, merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dilihat sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi.
- b. Integrasi, merupakan pengukuran atas tingkatan kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan sosialisasi dalam pengembangan consensus dan komunikasi pada beberapa macam organisasi yang lain.
- c. Adaptasi, merupakan suatu cara dalam mengukur bagaimana suatu organisasi mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, kemampuan ini merupakan suatu kemampuan untuk merubah dan menyelaraskan prosedur standar operasionalnya secara dinamis jikalau terjadi perubahan pada lingkungannya. Dengan demikian adaptasi ialah suatu proses penyesuaian yang terjadi pada suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya.

Kerangka pemikiran ini ditinjau sebagai landasan secara sistematis yang digunakan sebagai sebuah pedoman dalam pembahasan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan pada data dan juga permasalahan yang dikaji pada penelitian ini maka peneliti menggunakan teori tersebut karena relevan dengan permasalahan yang ditemui di Desa

Cipendawa. Adapun gambaran mengenai Efektivitas Website sebagai Media informasi APBDes di Desa Cipendawa, dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 1. 1**

**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Diolah Peneliti, 2024

**G. Hasil Penelitian yang Relevan**

Penelitian terdahulu memiliki tujuan dan fungsi sebagai usaha peneliti untuk menemukan pembandingan dalam mendeskripsikan hasil penelitian sebelumnya yang saling berkaitan dengan permasalahan yang sama dengan peneliti. Langkah ini diambil sebagai pedoman dalam menemukan pembaruan serta inovasi dan gagasan baru bagi peneliti selanjutnya. Di sisi lain, penelitian terdahulu menjadi alat untuk membedakan serta menunjukkan keaslian dalam penelitian. Sebagai bahan rujukan, terdapat penelitian terkait Efektivitas

Website Desa sebagai Media Informasi Pengelolaan APBDes di Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Adhitya Pradana dengan skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Sistem Informasi Desa Kelurahan Terong (Studi Kasus di Kelurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”** (Pradana, 2023) penelitian ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dalam upaya memudahkan pemerintah desa dalam mengakses data penduduk dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi di kelurahan terong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan sistem informasi desa pemerintah kelurahan terong telah menjadi media transparansi pada laporan APBDes pada website Kelurahan Terong menunjukkan hasil yang optimal.
2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Eko Indra Pangestu dengan Skripsi yang berjudul **“Perancangan Website Pemerintah Desa sebagai Media Penyebaran Informasi bagi Masyarakat Berbasis Website”** (Pangestu, 2022) dalam penelitiannya mempunyai tujuan untuk mengembangkan sistem informasi desa berbasis web untuk meningkatkan dan memudahkan akses informasi kepada Masyarakat baik itu data potensi desa, profil desa, kegiatan Masyarakat, Lembaga

Masyarakat, sarana dan prasarana, dan data keuangan desa seperti APBDes dan BUMDes. Pada penelitian ini menggunakan *metode Waterfall dan Webqual 4.0* dan Observasi lapangan.

Hasil dari penelitian ini sudah berhasil dibuatkan sebuah website pada Desa Sadar Sriwijaya yang bersumber pada hasil uji *Black Box testing* dengan 6 fitur yang diujikan berhasil, dan informasi yang ditampilkan telah mengacu pada Undang-undang no 6 tahun 2014 pasal 86 dan kualitas informasi telah diujikan melalui metode webqual 4.0 dengan hasil pengujian dengan nilai 90,58% dengan kategori sangat baik.

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Khoirunisa dengan judul skripsi **“Optimalisasi Penggunaan Website Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru”** Pada penelitian yang dilakukan oleh (Khoirunisa, 2021) bertujuan untuk melihat optimalisasi pada penggunaan website pada masa pandemi covid-19 di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan melihat apa saja hambatan yang dialami dalam mengoptimalkan penggunaan website dalam upaya meningkatkan pelayanan public pada masa pandemi. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu, belum optimal implementasi dari penggunaan website disebabkan oleh 1) masyarakat belum terbiasa atau beradaptasi dengan kebijakan baru dengan sistem pelayanan yang berbeda. 2) kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat sehingga Masyarakat belum banyak yang mengetahui dan memahami tentang sistem pelayanan menggunakan website. 3) kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas mengakibatkan banyak Masyarakat yang tidak terbantu dan 4) server dan jaringan website yang sering bermasalah mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan.

4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lena Riani dengan judul Skripsi **“Kebijakan Website Desa Terhadap Penyebaran Informasi Pembangunan di Gampong Lampeudaya Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”** Pada penelitian yang dilakukan oleh (Riani, 2020) bertujuan untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana kebijakan website di desa gampong lampeudaya dapat berpengaruh pada penyebaran informasi pembangunan, peluang dan tantangan pemerintah desa gampong lampeudaya dalam menerapkan kebijakan website terhadap penyebaran informasi Pembangunan. Metode peneliti menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan website desa masih diperlukan evaluasi lanjut dikarenakan Masyarakat tidak semuanya menggunakan serta



memanfaatkan website desa tersebut. Selanjutnya tantangan serta peluang pemerintah dalam menerpakan website yaitu tidak semua Masyarakat paham dan mnegerti mengenai website desa, dengan ini dengan adanya website desa belum dapat memberikan perubahan yang signifikan dalam proses penyebaran informasi Pembangunan kepada Masyarakat di Desa Gampong Lampeudaya.

5. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mainal Furqan dengan skripsinya yang berjudul **“Efektivitas Pengelolaan Website Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Camat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”** Pada penelitian yang dilakukan oleh (Furqan, 2020) bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan website di kantor camat Syiah Kuala terhadap kepuasan Masyarakat dalam meperoleh informasi melalui website. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan website Kantor Camat Syiah Kuala belum efektif dikarenakan informasi masih belum terupdate dan masih belum tersedia dikarenakan pihak kantor camat syiah kuala kekurangan sumberdaya manusia yang paham dan menguasai pada bidang IT sehingga jumlah pengakses masih terbilang sedikit dan desain pada website masih belum mampu menarik masyarakat untuk mengakses website dikarenakan tampilan yang kurang menarik sehingga masyarakat merasa bosan dalam mengakses website Kantor Camat Syiah Kuaka yaitu pada laman [syiahkualakec.bandaacehkota.go.id](http://syiahkualakec.bandaacehkota.go.id). website ini berfungsi sebagai

media penyampaian informasi kepada masyarakat serta sebagai media promosi, pihak pemerintah Kantor Camat Syiah Kuala kedepannya diharapkan bisa meningkatkan pengelolaan website dengan lebih efektif dan efisien.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian dan Tahun	Perbedaan
1.	Adhitya Pradana	Pemanfaatan Sistem Informasi Desa Kelurahan Terong (Studi Kasus di Kelurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2023)	Teori yang digunakan, metode penelitian yaitu dengan kualitatif eksploratif dan lokus yang berbeda.
2.	Eko Indra Pangestu	Perancangan Website Pemerintah Desa sebagai Media Penyebaran Informasi bagi Masyarakat Berbasis Web (2022)	Teori yang digunakan, lokus penelitian dan metode yang digunakan yaitu dengan metode <i>Waterfall</i> dan <i>Webqual 4.0</i>
3.	Siti Khoirunisa	Optimalisasi Penggunaan Website Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (2021)	Teori yang digunakan menggunakan teori E-Government oleh Richardus Eko Indrajid, Variabel yang digunakan

			dan Lokus penelitian.
4.	Lena Riani	Kebijakan Website Desa Terhadap Penyebaran Informasi Pembangunan di Gampong Lampeudaya Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar (2020)	Teori yang digunakan yaitu teori kebijakan public, variable penelitian dan lokus penelitian.
5.	Mainal Furqan	Efektivitas Pengelolaan Website Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Camat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh (2020)	Teori yang digunakan dan Lokasi Penelitian

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan oleh peneliti pada penelitian terdahulu, novelty ataupun kebaharuan dari penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian terdahulu adalah pada penggunaan teori yang digunakan. Oleh karena itu, yang menjadi pembeda utama dalam semua penelitian terdahulu yang telah dipaparkan adalah teori yang digunakan, serta beberapa pembeda lain diantaranya tahun pengambilan data, dan lokus atau tempat penelitian.

#### H. Proposisi

Efektivitas website desa sebagai media informasi APBDes di desa cipendawa dapat berjalan dengan maksimal jika memenuhi indikator, pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hal-hal tersebut dapat menjadi perhatian bagi instansi agar mampu untuk memaksimalkan website desa sebagai media informasi APBDes di Desa Cipendawa.